

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tidak menjamin kepala daerah bersih dari korupsi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 10 kepala daerah penerima opini WTP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Opini BPK ada beberapa daerah yang mendapat WTP. Tapi, menjadi anomali ketika daerah yang dapat WTP kepala daerahnya malah terjerat korupsi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Berdasarkan data ICW, ada 10 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi meski mendapat opini WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018. Berikut daftar 10 kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK: 1. Bupati Purbalingga Tasdi 2. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari 3. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 4. Gubernur Riau Rusli Zainal 5. Gubernur Riau Annas Maamun 6. Bupati Bangkalan Fuad Amin 7. Wali Kota Tegal Ikmal Jaya 8. Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar 9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 10. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Menurut ICW, opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi.

Akuntansi Keuangan Daerah masih menganut prinsip dasar Akuntansi pada umumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju. Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Pemberlakuan Akuntansi Keuangan Daerah telah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009). "Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial".

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Organisasi perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, tentu akan menghasilkan kualitas informasi yang dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu (*timelines*) menunjukkan pada interval waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan oleh pengguna yang berbeda dan frekuensi pelaporan informasi. Sistem pelaporan dalam penelitian ini dikonseptualkan menjadi tiga dimensi yaitu (1) kecepatan membuat laporan, (2) laporan yang berbeda pada pengguna yang berbeda, (3) frekuensi laporan.

Kepala OPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut lalu disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan anggaran terdapat hubungan keagenan yang terjadi antara pengusul anggaran dengan yang menerima usulan anggaran. Implikasi *agency theory* dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku *dysfunctional*.

Menurut Novtania Mokoginta (2017), Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Hasil penelitian dari Novtania

Mokoginta (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah yaitu tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Irzal (2017), Kadek Henki (2014), Ida Ayu, Embun Widya (2017), Dewi Kusuma (2017), Lizina Widari (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Ida Bagus Pujiswara (2014) Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian, serta penyiapan laporan kuangan lebih tepat waktu sehingga dapat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan dan mampu untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Hasil penelitian dari Ida Bagus Pujiswara (2014), Luh Kadek Sri Megawati), Irzarl (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari masalah-masalah dan keterangan diatas peneliti akan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Daerah”**

1.2.Perumusan Masalah

- 1 Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah?
- 2 Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Untuk Mengetahuin adanya pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

1.4.Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah ditetapkan diatas, maka manfaat penelitian yang dapat dicapai yakni:

1. .Bagi Teoritis

Supaya mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah, dan memperdalam pengetahuan terutama dalam kualitas laporan kuangan di wilayah pedesaan.

2. Bagi Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi STIE PERBANAS Surabaya agar dapat memahami kualitas laporan keuangan pada segi perangkat daerah sekitar.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan lebih luas bagi penulis mengenai kualitas laporan keuangan pada perangkat desa lebih detail dan lebih jelas.

4. Bagi Perusahaan atau Perangkat Kerja Daerah Lainnya

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan atau perangkat kerja daerah lainnya, bahwa pentingnya kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan dapat meningkatkan kreatifitas karyawan.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data hasil uji, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan , keterbatasan, dan saran